



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 61
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung No. 12 P/HUM/2024 terkait Uji Materiil Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemabraan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 79) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2024

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

Ttd

SUDONO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 88

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 61
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

1. Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri poin c. Biaya Penginapan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- c. Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui digunakan untuk menyusun perencanaan maupun dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan diberikan bantuan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain berpedoman pada peraturan Bupati tentang standar harga satuan. Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah/pejabat Eselon I, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilakukan secara at cost (biaya riil).

Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh bupati/wakil bupati, kepada ajudan bupati/wakil bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan bupati/wakil bupati tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

2. Ketentuan Satuan Biaya Kegiatan Lainnya poin d. Standar Biaya Kegiatan Lain-Lain diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- d. Standar Biaya Kegiatan Lain-Lain

Standar biaya kegiatan lain-lain merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan mencakup kegiatan-kegiatan yang sering dibutuhkan yang tidak dapat dikelompokkan dalam standar biaya huruf a sampai dengan huruf d.

Tabel
Satuan Biaya Kegiatan

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor
a. Jamuan Makan

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	ACEH	OP	300.000.00	330.000.00	772.000.00	630.000.00
2.	SUMATRRA UTARA	OP	178.000.00	275.000.00	746.000.00	453.000.00
3.	RIAU	OP	185.000.00	245.000.00	591.000.00	430.000.00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000.00	273.000.00	625.000.00	500.000.00
5.	JAMBI	OP	215.000.00	301.000.00	840.000.00	516.000.00
6.	SUMATERA BARAT	OP	173.000.00	240.000.00	663.000.00	413.000.00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	218.000.00	293.000.00	745.000.00	511.000.00
8.	LAMPUNG	OP	216.000.00	270.000.00	640.000.00	486.000.00
9.	BENGKULU	OP	214.000.00	284.000.00	912.000.00	498.000.00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	299.000.00	385.000.00	804.000.00	684.000.00
11	BANTEN	OP	275.000.00	354.000.00	837.000.00	629.000.00
12	JAWA BARAT	OP	331.000.00	398.000.00	822.000.00	729.000.00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	354.000.00	433.000.00	1.197.000.00	787.000.00
14.	JAWA TENGAH	OP	191.000.00	263.000.00	675.000.00	454.000.00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	210.000.00	310.000.00	750.000.00	520.000.00
16.	JAWA TIMUR	OP	338.000.00	395.000.00	1.352.000.00	733.000.00
17.	BALI	OP	330.000.00	441.000.00	1.182.000.00	771.000.00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000.00	420.000.00	764.000.00	700.000.00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	271.000.00	377.000.00	825.000.00	648.000.00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	250.000.00	331.000.00	664.000.00	581.000.00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	242.000.00	340.000.00	1.031.000.00	582.000.00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	194.000.00	295.000.00	734.000.00	489.000.00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	207.000.00	302.000.00	750.000.00	509.000.00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	207.000.00	302.000.00	750.000.00	509 000.00
25.	SULAWESI UTARA	OP	185.000.00	270.000.00	737.000.00	455.000.00
26.	GORONTALO	OP	175.000.00	250.000.00	1.299.000.00	425.000.00
27.	SULAWESI BARAT	OP	235.000.00	323.000.00	792.000.00	558.000.00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	206.000.00	320.000.00	1.127.000.00	526.000.00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	234.000.00	385.000.00	738.000.00	619.000.00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	195.000.00	295.000.00	688.000.00	490.000.00
31.	MALUKU	OP	253.000.00	346.000.00	724.000.00	599.000.00
32.	MALUKU UTARA	OP	169.000.00	354.000.00	669.000.00	523.000.00
33.	PAPUA	OP	293.000.00	478.000.00	990.000.00	771.000.00
34.	PAPUA BARAT	OP	284.000.00	421.000.00	1.120.000.00	705.000.00

b. Biaya Penginapan

No	Nama Provinsi	Bupati/Wakil Bupati. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD / Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol IV	Pejabat Eselon IV/ Gol III. II dan I
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	3.440.0000	3.175.000	1.073.000	600.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000

No	Nama Provinsi	Bupati/Wakil Bupati. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD / Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol IV	Pejabat Eselon IV/ Gol III. II dan I
34	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000
4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	39.950.000
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Roda 4	Unit/Tahun	34.880.000
6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Roda 4; Double Gardan	Unit/Tahun	38.050.000
7	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Roda 2	Unit/Tahun	3.950.000
8	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
9	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
10	Pemeliharaan Speed Boat		Unit/Tahun	20.240.000

4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Kendaraan Dinas

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Kendaraan Dinas Pejabat	Pejabat Eselon II	Unit	444.496.000
2	Double Gardan	Roda 4; Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit	468.830.000
3	Bus	Roda 6; dan/atau Bus Besar; Kendaraan Operasional	Unit	1.184.787.000
4	Bus	Roda 6; dan/atau Bus Sedang; Kendaraan Operasional	Unit	718.252.000
5	Micro Bus	Roda 4; dan/atau Bus Kecil; Kendaraan Operasional	Unit	360.942.000
6	Minibus	Roda 4; Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit	310.732.000
7	Pick Up	Roda 4; Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit	208.312.000
8	Sepeda Motor	Roda 2; Lapangan	Unit	33.815.000
9	Sepeda Motor	Roda 2; Operasional	Unit	30.213.000

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

Ttd

SUDONO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 88

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 61
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

1. Satuan Biaya Transport diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut:
a. Biaya Transport.

Biaya transport adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan sepanjang ada tanda bukti pengeluaran yang sah.

Biaya transport terdiri dari:

- 1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP).

Standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan. yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).

Standar kelas pesawat sebagai berikut:

Uraian	Kelas
Bupati. Wakil Bupati. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Bisnis
Sekretaris Daerah. Anggota DPRD serta pejabat lainnya	Ekonomi
ASN dan Masyarakat	Ekonomi

- 2) Biaya Kereta

Pembiayaan tiket kereta perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket kereta sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost). Standar kelas kereta sebagai berikut:

Uraian	Kelas
Bupati. Wakil Bupati. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Eksekutif
Sekretaris Daerah. Anggota DPRD serta pejabat lainnya	Eksekutif
ASN dan Masyarakat	Eksekutif

- 3) Biaya Taksi

Standar biaya taksi adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi. terdiri dari tempat lokasi ke bandara. dari bandara ke tujuan lokasi penyelenggaraan acara demikian pula sebaliknya.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara. pelabuhan. terminal. atau stasiun. biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).

- 4) Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way).
Standar biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara. pejabat daerah. Aparatur Sipil Negara. dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya.

SATUAN BIAYA TRANSPORT

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000.00	7.081.000.00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000.00	3.797.000.00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000.00	4.492.000.00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000.00	1.583.000.00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000.00	2.995.000.00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000.00	2.888.000.00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000.00	2.621.000.00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000.00	7.519.000.00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000.00	3.262.000.00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000.00	4.824.000.00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000.00	2.460.000.00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000.00	8.193.000.00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000.00	2.268.000.00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000.00	4.182.000.00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000.00	5.081.000.00
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000.00	3.829.000.00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000.00	2.695.000.00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000.00	4.867.000.00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000.00	5.102.000.00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000.00	10.824.000.00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000.00	3.230.000.00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000.00	3.808.000.00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000.00	2.952.000.00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000.00	2.984.000.00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000.00	2.268.000.00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000.00	5.113.000.00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000.00	2.139.000.00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000.00	3.016.000.00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000.00	2.781.000.00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000.00	2.182.000.00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000.00	2.342.000.00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000.00	2.674.000.00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000.00	6.664.000.00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000.00	7.487.000.00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000.00	4.471.000.00
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000.00	4.161.000.00
37	AMBON	KENDARI	4.824.000.00	2.856.000.00
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000.00	3.455.000.00
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000.00	3.027.000.00
40	AMBON	PALU	6.140.000.00	3.508.000.00
41	AMBON	SORONG	3.637.000.00	2.257.000.00
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000.00	4.845.000.00
43	AMBON	TERNATE	4.022.000.00	2.449.000.00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000.00	6.749.000.00
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000.00	5.305.000.00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000.00	5.648.000.00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000.00	10.086.000.00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000.00	4.749.000.00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000.00	6.150.000.00
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000.00	7.295.000.00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000.00	6.140.000.00
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000.00	5.369.000.00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000.00	4.749.000.00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000.00	5.423.000.00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000.00	4.674.000.00
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000.00	4.813.000.00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000.00	5.113.000.00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000.00	9.445.000.00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000.00	6.279.000.00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000.00	10.717.000.00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000.00	5.380.000.00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000.00	6.781.000.00
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000.00	7.926.000.00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000.00	5.840.000.00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000.00	5.305.000.00
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000.00	5.444.000.00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000.00	5.744.000.00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000.00	10.076.000.00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000.00	4.129.000.00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000.00	4.760.000.00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000.00	3.412.000.00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000.00	3.316.000.00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000.00	7.487.000.00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000.00	3.647.000.00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000.00	8.097.000.00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000.00	2.760.000.00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000.00	4.482.000.00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000.00	4.161.000.00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000.00	3.134.000.00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000.00	5.305.000.00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000.00	3.626.000.00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000.00	4.150.000.00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000.00	3.380.000.00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000.00	3.401.000.00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000.00	2.760.000.00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000.00	3.433.000.00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000.00	3.220.000.00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000.00	2.685.000.00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000.00	2.824.000.00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000.00	3.123.000.00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000.00	7.455.000.00
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000.00	3.583.000.00
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000.00	3.252.000.00
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000.00	1.476.000.00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000.00	2.941.000.00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000.00	2.129.000.00
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000.00	3.508.000.00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000.00	2.631.000.00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000.00	2.738.000.00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000.00	3.701.000.00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000.00	1.957.000.00
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000.00	2.268.000.00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000.00	2.856.000.00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000.00	2.663.000.00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000.00	6.022.000.00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000.00	4.578.000. 00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000.00	8.749.000.00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000.00	4.920.000.00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000.00	9.359.000.00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000.00	4.022.000.00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000.00	5.412.000.00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000.00	4.642.000.00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000.00	4.022.000.00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000.00	4.696.000.00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000.00	3.958.000.00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000.00	4.097.000.00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000.00	4.385.000.00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000.00	8.717.000.00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000.00	5.936.000.00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000.00	4.824.000.00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000.00	9.263.000.00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000.00	3.936.000.00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000.00	5.337.000.00
124	BATAM	MANADO	13.413.000.00	6.482.000.00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000.00	5.316.000.00
126	BATAM	PADANG	8.653.000.00	4.546.000.00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000.00	3.936.000.00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000.00	4.599.000.00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000.00	4.396.000.00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000.00	3.861.000.00
131	BATAM	SOLO	7.145.000.00	4.000.000.00
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000.00	4.300.000.00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000.00	8.621.000.00
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000.00	1.893.000.00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000.00	9.477.000.00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000.00	10.108.000.00
137	BIAK	BATAM	16.333.000.00	8.664.000.00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000.00	8.995.000.00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000.00	2.321.000.00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000.00	8.108.000.00
141	BIAK	MANADO	11.734.000.00	6.353.000.00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000.00	9.498.000.00
143	BIAK	PADANG	16.932.000.00	8.728.000.00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000.00	8.108.000.00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000.00	8.781.000.00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000.00	8.568.000.00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000.00	7.081.000.00
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000.00	3.444.000.00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000.00	6.845.000.00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000.00	2.952.000.00
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000.00	2.631.000.00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000.00	4.278.000.00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000.00	1.390.000.00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000.00	5.658.000.00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000.00	4.888.000.00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000.00	4.909.000.00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000.00	4.278.000.00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000.00	4.942.000.00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000.00	4.738.000.00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000.00	6.129.000.00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000.00	4.407.000.00
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000.00	4.193.000.00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000.00	4.439.000.00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000.00	3.551.000.00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000.00	6.075.000.00
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000.00	4.952.000.00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000.00	3.925.000.00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000.00	6.097.000.00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000.00	4.193.000.00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000.00	4.011.000.00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000. 00	3.476.000.00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000.00	3.615.000.00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000.00	3.915.000.00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000.00	7.690.000.00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000.00	11.263.000.00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000.00	10.097.000.00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000.00	9.327.000.00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000.00	8.717.000.00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000.00	9.380.000.00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000.00	9.177.000.00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000.00	2.289.000.00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000.00	2.481.000.00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000.00	3.893.000.00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000.00	5.722.000.00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000.00	4.770.000.00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000.00	4.000.000.00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000.00	3.380.000.00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000.00	4.054.000.00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000.00	3.840.000.00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000.00	7.038.000.00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000.00	7.102.000.00
192	KENDARI	BATAM	10.568.000.00	5.658.000.00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000.00	3.273.000.00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000.00	4.706.000.00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000.00	5.722.000.00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000.00	5.102.000.00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000.00	5.776.000.00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000.00	5.027.000.00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000.00	5.166.000.00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000.00	5.466.000.00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000.00	9.798.000.00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000.00	8.108.000.00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000.00	4.182.000.00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000.00	4.311.000.00
205	KUPANG	MANADO	11.648.000.00	6.140.000.00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000.00	3.722.000.00
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000.00	4.931.000.00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000.00	5.787.000.00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000.00	1.786.000.00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000.00	2.909.000.00
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000.00	6.567.000.00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000.00	5.134.000.00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000.00	5.765.000.00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000.00	4.407.000.00
215	MALANG	BATAM	7.819.000.00	4.311.000.00
216	MALANG	BIAK	16.087.000.00	8.482.000.00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000.00	9.092.000.00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000.00	5.487.000.00
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000.00	5.166.000.00
220	MALANG	MANADO	13.167.000.00	6.311.000.00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000.00	5.145.000.00
222	MALANG	PADANG	8.418.000.00	4.385.000.00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000.00	4.407.000.00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000.00	3.765.000.00
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000.00	4.439.000.00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000.00	8.461.000.00
227	MANADO	MEDAN	15.552.000.00	7.316.000.00
228	MANADO	PADANG	14.012.000.00	6.546.000.00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000.00	5.926.000.00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000.00	6.599.000.00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000.00	6.396.000.00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000.00	5.851.000.00
233	MANADO	SOLO	12.504.000.00	5.990.000.00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000.00	5.262.000.00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000.00	8.995.000.00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000.00	5.615.000.00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000.00	6.246.000.00
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000.00	4.888.000.00
239	MATARAM	BATAM	8.461.000.00	4.803.000.00
240	MATARAM	BIAK	11.552.000.00	6.546.000.00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000.00	7.327.000.00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000.00	2.781.000.00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000.00	2.909.000.00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000.00	4.738.000.00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000.00	5.637.000.00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000.00	4.867.000.00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000.00	4.246.000.00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000.00	4.909.000.00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000.00	4.706.000.00
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000.00	2.321.000.00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466. 000.00	2.193.000.00
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000.00	6.172.000.00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000.00	5.230.000.00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000.00	4.696.000.00
255	MEDAN	SOLO	9.284.000.00	4.835.000.00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000.00	5.134.000.00
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000.00	9.455.000.00
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000.00	5.402.000.00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000.00	4.460.000.00
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000.00	3.925.000.00
261	PADANG	SOLO	7.744.000.00	4.065.000.00
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000.00	4 364 000.00
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000.00	8.685.000.00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000.00	6.022.000.00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000.00	4.578.000.00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000.00	4.022.000.00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000.00	4.888.000.00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000.00	5.412.000.00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000.00	4.642.000.00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000.00	4.022.000.00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000.00	4.696.000.00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000. 00	3.947.000.00
273	PALANG KARAYA	SOLO	7.252.000.00	4.086.000.00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000.00	4.385.000.00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000.00	5.220.000.00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000.00	4.781.000.00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000.00	3.840.000.00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000.00	3.305.000.00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000.00	3.444.000.00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000.00	3.744.000.00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000.00	8.076.000.00
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000.00	2.578.000.00
283	PALU	POSO	1.957.000.00	1.423.000.00
284	PALU	SORONG	6.878.000.00	3.883.000.00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
285	PALU	SURABAYA	6.878.000.00	3.883.000.00
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000.00	1.915.000.00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000.00	4.631.000.00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000.00	3.915.000.00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000.00	3.818.000.00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000.00	3.262.000.00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000.00	4.663.000.00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000.00	5.808.000.00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000.00	4.653.000.00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000.00	3.883.000.00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000.00	3.262.000.00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000.00	3.936.000.00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000.00	3.733.000.00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000.00	3.187.000.00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000.00	3.326.000.00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000.00	3.626.000.00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000.00	4.514.000.00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000.00	3.979.000.00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000.00	4.118.000.00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000.00	4.407.000.00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000.00	8.739.000.00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000.00	5.241.000.00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000.00	3.765.000.00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000.00	3.904.000.00
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000.00	4.204.000.00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000.00	8.535.000.00
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000.00	4.706.000.00
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000.00	4.845.000.00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000.00	1.979.000.00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000.00	7.231.000.00
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000.00	3.433.000.00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000.00	6.589.000.00

2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang/kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/kali	232.000
3	Riau	Orang/kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	137.000
5	Jambi	Orang/kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/kali	128.000
8	Lampung	Orang/kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/kali	90.000
11	Banten	Orang/kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/kali	166.000
13	D.K.I Jakarta	Orang/kali	256.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
14	Jawa Tengah	Orang/kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/kali	194.000
17	Bali	Orang/kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	171.000
31	Maluku	Orang/kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/kali	215.000
33	Papua	Orang/kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/kali	182.000

3. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	400.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	420.000
32	Medari	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	420.000
33	Medari	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/ Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/ Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/ Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/ Kali	203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	330.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/ Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/ Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/ Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/ Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	250.000
66	Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang/ Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/ Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komerling Ilir	Orang/ Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komerling Ulu	Orang/ Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan	Orang/ Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komerling Ulu Timur	Orang/ Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	423.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/ Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	347.000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab.Bandung	Orang/ Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/ Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kari	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kalt	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	240.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/ Kali	260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	253.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/ Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	325.000
246	Kupang	Kab Kupang	Orang/ Kali	175.000
247	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218.000
248	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang /Kali	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303.000
239	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang /Kali	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	257.000
	KALIMANTAN BARAT			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang /Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kai	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/ Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	550.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	170.000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Maene	Orang/ Kali	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	359.000
311	Mamuju	Kab. Mamiiju Tengah	Orang/ Kaji	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kaji	270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	260.000
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	175.000
320	Makassar	Kab. Jenepono	Orang/ Kali	230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang /Kali	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang /Kali	235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	235.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang /Kai	190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang /Kali	230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang /Kali	472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/ Kali	280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/ Kali	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/ Kali	350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/ Kali	370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/ Kali	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	300.000
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	900.000
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/ Kali	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/ Kali	2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/ Kali	1.134.000
	PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/ Kali	900.000
361	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/ Kali	750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/ Kali	1.000.000

4. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten / Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ Kali	284.000
2	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Orang/ Kali	284.000
3	Jakarta	Kota Bogor	Orang/ Kali	300.000
4	Jakarta	Kabupaten Bogor	Orang/ Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	286.000
8	Jakarta	Kabupaten Tangerang	Orang/ Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/ Kali	428.000

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

Ttd

SUDONO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 88